

Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Makassar

Budiandriani¹, Sri Wahyuni Al Aqzah², Sitti Rahmi Razak³,
Mahfudnurnajamuddin⁴

1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia
budiandrianimt@umi.ac.id, sriwahyunial.aqzah@gmail.com,
rahmirazak88@gmail.com, mahfud.nurnajamuddin@umi.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the effectiveness and efficiency of regional financial management in Makassar City. The data used is secondary data in the form of financial reports from the Makassar City Regional Financial and Asset Management Agency. This research uses a quantitative approach, namely by analyzing the effectiveness and efficiency of regional financial management and describing research findings. The research results found that regional financial management in Makassar City in 2017-2022 was in the effective category, namely with an average of 92.21% per year. Meanwhile, based on the level of efficiency, it shows that in 2017-2022 the regional financial management of Makassar City was in the less efficient category with an average of 96.80% per year.

Keywords: Regional Finance, Effectiveness, Efficiency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Daerah di Kota Makassar. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta mendeskripsikan temuan penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Makassar tahun 2017-2022 berada pada kategori efektif, yaitu dengan rata-rata 92,21% per tahun. Sedangkan berdasarkan pada tingkat efisiensi, menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2022 pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar berada pada kategori kurang efisien dengan rata-rata 96,80% per tahun.

Kata kunci: Keuangan Daerah, Efektivitas, Efisien

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi daerah yang mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan asas demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keunikan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Manimbaga et al., 2021).

Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ekonomi nasional dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Salah satu ciri demokrasi ekonomi adalah perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antara daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendaya gunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal. Upaya peningkatan pembangunan daerah harus didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerintah membangun di seluruh tanah air.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu lapangan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan ciri khas daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber fisik secara lokal (Trianto, 2016).

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk melaksanakan pembangunan, dimana pembiayaan tersebut berasal dari APBD. Searah dengan adanya otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya secara baik. Perlimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pengelolaan keuangan yang di lakukan dengan efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena hal ini berkaitan dengan target dan realisasi penerimaan daerah, dan ternyata realisasi sering kali tidak sesuai dengan target. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adanya peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2018 sebesar Rp12.124.510.461 atau dengan persentase 0,35% dari tahun 2017. Selain itu, realisasi belanja pegawai sebesar Rp 992.802.177.373, dan realisasi belanja modal sebesar Rp625.019.873.537.

Pujiastuti et al., (2020) mengatakan bahwa analisis rasio keuangan terhadap realisasi PAD harus dilakukan agar meningkatkan kualitas pada saat pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan indikator kemandirian suatu daerah. Artinya semakin meningkatnya proporsi penerimaan PAD terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah yang ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah tersebut menunjukkan kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya.

Lasupu et al., (2021) mengatakan efektivitas berkaitan dengan korelasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang dicapai. Apabila pengelolaan keuangannya sudah efisien dan efektif ini berarti bahwa adanya suatu jaminan ketersediaan dana pembangunan dan kalau pengelolaannya belum efisien dan efektif

maka perlu untuk didorong lagi agar pengelolaannya lebih membaik dan ini akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri, sehingga hal ini akan menjamin kemandirian keuangan daerah akan semakin membaik.

Syahputra & Rahmat (2021) menemukan bahwa adanya keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek efektivitas dan efisiensi. Ahmad et al., (2020) menemukan bahwa analisis kebutuhan SDM pengelola keuangan dan aset daerah Kota Makassar belum memadai. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Makassar".

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah dapat menjadi sistem untuk menghasilkan dan mengendalikan sumber daya keuangan publik untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan publik atau daerah meliputi perencanaan dan penganggaran, akuntansi, dan pelaporan, pengendalian internal, audit dan pengawasan eksternal, antara lain dengan maksud untuk meningkatkan ketersediaan manfaat untuk jumlah warga yang terbesar, mendukung pemerintahan yang baik (*good govermence*) dan memfasilitasi pencapaian tiga tujuan anggaran disiplin agregat fiskal, alokasi sumber daya secara efektif untuk prioritas dan pelayanan yang efisien (Widiyanto et al., 2015).

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau anggaran pendapatan belanja daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sedangkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka otonom daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Permendagri, 2020).

Pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan keuangan daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dan mendasar dalam pemerintahan, karena berupaya dapat memperbaiki berbagai

kekurangan atau kelemahan dan memberikan arahan tujuan tindakan yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan tonggak dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang digunakan Pemerintah Daerah sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam melaksanakan otonomi daerah (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Kemendagri, 2019). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendataan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan melalui sistem informasi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas berkaitan dengan korelasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual yang dicapai. Efektivitas menunjukkan suatu keadaan yang ditandai dengan terwujudnya dampak atau hasil yang diinginkan. Dengan demikian, suatu kegiatan dianggap efektif jika menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai PAD yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Efektivitas yang lebih besar menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang lebih baik. Efektivitas mengacu pada penggunaan sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah komoditas tertentu untuk layanan yang dilakukan (Suprayoga et al., 2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan keuangan yang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Efisiensi Pengelolaan Keuangan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut keuangan dengan realisasi penerimaan keuangan. Semakin rendah tingkat efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Syahputra & Rahmat, (2021) menjelaskan bahwa efisiensi adalah pencapaian *output* optimal dengan *input* tertentu atau pemanfaatan *input* minimal untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi adalah penilaian rasio *input-output* relatif

terhadap standar kinerja atau tujuan tertentu. Semakin besar *output* di banding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Saknosiwi et al., 2021).

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis penyajian Laporan Keuangan yang di lakukan Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Makassar dengan mengacu pada ketentuan APBD yang terbit dari tahun 2017 hingga 2022 yang sudah berlaku. Data yang digunakan data kuantitatif yang berada di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD). Setelah itu mengelola data yang didapat menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi. Sehingga dapat menganalisis data yang tepat yang sudah tervalidasi agar dapat mengambil Kesimpulan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana semua data dan dokumen yang terkumpul diolah dan selanjutnya dijelaskan secara deskriptif berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan yang menggunakan data numerik sebagai sarana untuk memperoleh informasi tentang pertanyaan tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD) sudah dikelola secara efektif dan efisien.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu mengacu pada informasi yang dapat dikuantifikasi pada skala numerik atau langsung dihitung sebagai nilai numerik. Data penelitian ini adalah dokumen dan laporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar (BPKAD) tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran di Kota Makassar, berdasarkan data laporan realisasi anggaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. Adapun formulasi yang digunakan adalah:

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan keuangan yang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Daerah yaitu kurang dari 60% dikatakan tidak efektif, 60%-80% dikatakan kurang efektif, 80%-90% dikatakan cukup efektif, 90%-100% dikatakan efektif dan di atas 100% dikatakan sangat efektif.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut keuangan dengan realisasi penerimaan keuangan. Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja atau pengeluaran}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

Analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu kurang dari 60% dikatakan tidak efektif, 60%-80% dikatakan kurang efektif, 80%-90% dikatakan cukup efektif, 90%-100% dikatakan efektif dan di atas 100% dikatakan sangat efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan keuangan yang menekankan pada pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan realisasi pendapatan atau dengan yang sudah dianggarkan sebelumnya.

Tabel 1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Target Pendapatan (Rp)	Persentase (100%)	Kriteria
2017	Rp3.416.355.218.701	Rp3.517.452.010.000	97,12	Efektif
2018	Rp3.428.479.729.162	Rp3.892.235.958.000	88,08	Cukup efektif
2019	Rp3.666.359.990.154	Rp4.055.576.463.716	90,40	Efektif
2020	Rp3.323.662.286.602	Rp3.469.163.140.080	95,81	Efektif
2021	Rp3.286.048.497.393	Rp3.577.236.761.303	91,86	Efektif
2022	Rp3.587.333.930.242	Rp3.986.429.637.856	89,98	Cukup Efektif
Rata-rata			92,21	Efektif

Sumber: BPKAD Kota Makassar diolah (2024)

Tabel 1 menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Makassar pada tahun 2017-2022 berada pada kategori efektif karena angka persentasenya sebesar rata-rata sebesar 92.21% per tahun.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Efisiensi pengelolaan keuangan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan cara perbandingan total realisasi belanja atau pengeluaran dengan total realisasi pendapatan di kali dengan 100%. Hasil tersebut dapat menjadi sebuah kesimpulan apakah kinerja pemerintah dapat dikatakan efisien ataupun tidak efisien dilihat dari hasil perhitungan efisiensi.

Tabel 2. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun	Realisasi Pengeluaran (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase (100%)	Kriteria
2017	Rp3.313.623.623.887	Rp3.416.355.218.701	96,99	Kurang Efisien
2018	Rp3.526.081.002.897	Rp3.428.479.729.162	102,84	Tidak Efisien
2019	Rp3.549.123.220.749	Rp3.666.359.990.154	96,80	Kurang Efisien
2020	Rp2.969.786.003.772	Rp3.323.662.286.602	89,35	Cukup Efisien
2021	Rp3.150.496.728.994	Rp3.286.048.497.393	95,87	Kurang Efisien
2022	Rp3.550.062.984.209	Rp3.587.333.930.303	98,96	Kurang Efisien
Rata-rata			96,80	Kurang Efisien

Sumber: BPKAD Kota Makassar diolah (2024)

Tabel 2 menunjukkan rata-rata Efisiensi Pengelolaan Keuangan di tahun 2017-2022 pada pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar menunjukkan kurang efisien dari segi realisasi belanja dengan mendapat persentase angka sebesar 96,80%.

Pembahasan

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Makassar

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Kota Makassar selama tahun 2017 sampai tahun 2022 berfluktuasi dan cenderung naik turun. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas adalah 92,21% dengan kriteria efektif. Perhitungan rata-rata tingkat efektivitas dari tahun 2017-2022 memiliki kriteria efektif menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kota Makassar dalam mengelola keuangan daerah sudah baik dan optimal walaupun naik turun tapi masih dalam kriteria efektif, sehingga pencapaian *output* berdasarkan *input* yang ditetapkan sudah optimal.

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Makassar setiap tahunnya tingkat efektivitasnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, efektivitasnya meningkat signifikan karena didukung oleh berbagai sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, efektivitasnya mengalami penurunan. Penurunan tingkat efektivitas tersebut sebagian besar disebabkan oleh menurunnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Pada tahun 2019, efektivitas membaik karena meningkatnya penerimaan retribusi daerah. Pada tahun 2020, efektivitas kembali membaik karena meningkatnya penerimaan pajak daerah. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 efektivitas kembali menurun karena menurunnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, Pahlevi et al., (2023) mengatakan bahwa hibah khusus merupakan transfer barang yang seharusnya dialokasikan hanya untuk program yang sebelumnya ditentukan yaitu program wajib sehingga tidak dapat digeser atau diubah ke alokasi lainnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar harus meningkatkan pengelolaan pendapatannya agar dapat terus mempertahankan atau meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya dan memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Hidayat et al., (2016) mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Mizan & Rahmawati, (2020) mengatakan penetapan tarif mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pendapatan daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Makassar

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi pengelolaan Keuangan di

Kota Makassar, maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2022 tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kota Makassar berfluktuasi.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efisiennya pengeluaran antara lain adanya belanja tidak langsung yang cukup besar seperti belanja pegawai, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga. Selain itu, pengeluaran untuk belanja langsung seperti belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja hibah juga turut berkontribusi terhadap kurang efisiennya pengeluaran. Selain itu, terdapat peningkatan efisiensi pada tahun 2019 dan 2020. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami penurunan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kota Makassar.

Manimbaga et al.,(2021) mengatakan bahwa pemerintah daerah seharusnya melakukan penyusunan anggaran yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah wajib melakukan optimalisasi anggaran efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Koromath, 2020). Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran belanja Kota Makassar agar dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran dan mengurangi selisih antara pengeluaran dan pendapatan yang diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar dari tahun 2017 sampai tahun 2022 cenderung meningkat dengan rata-rata tingkat efektivitasnya 92,21% per tahun, sehingga dikategorikan efektif. Sedangkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar dari tahun 2017 sampai tahun 2022 adalah rata-rata sebesar 96,80% per tahun, sehingga dikategorikan kurang efisien. Faktor yang menyebabkan kurang efisiennya pengelolaan keuangan daerah di Kota Makassar antara lain disebabkan adanya belanja tidak langsung yang cukup besar.

Saran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar perlu terus meningkatkan pengelolaan pendapatannya untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar harus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran belanja untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran dan mengurangi selisih antara pengeluaran dan pendapatan yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, I., Mahfudnurnajamuddin, ., Mas'ud, M., & Suriyanti, . (2020). Competencies of Apparatus and Internal Control System Effect on The quality of Financial

- Statement Information and Good Governance. *European Journal of Business and Management Research*, 5(4), 1–6. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.425>
- Dewi, N. K. P., & Suci, N. M. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Talibeng. *Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 88–94. <https://doi.org/10.23887/pjmb.v5i1.60518>
- Dirasmi, S., & Soleh, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Baabu Al-Ilmi*, 01(02), 1–18.
- Hidayat, R., Mahfudnurnajamuddin & Masdar, M. (2016). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Manajemen, EMOR*, Volume 1, Nomor 1, 115–125. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/emor/article/view/1024>
- Kemendagri. (2019). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Koromath, J. P. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. *Lensa Ekonomi*, 11(01), 13. <https://doi.org/10.30862/lensa.v11i01.75>
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1433–1441.
- Manimbaga, F., Sondakh, J., & Pinatik, S. (2021). Analysis of Effectiveness and Efficiency of Regional Financial Performance of Bitung City Government Budget Year 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982–992.
- Mizan, V. M., & Rahmawati, I. (2020). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Retribusi Pasar Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. *Jurnal Riset Inossa Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020*, 2, 99–110.
- Nuzulul Siswo Abdulaziz. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(2), 646–659. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.142>
- Pahlevi, C., Taba, M. I., Ismail, M., Muis, M., Parawansa, D., Haerani, S., Maupa, H., & Razak, S. R. (2023). Tinjauan Kritis Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Anggaran: Perspektif Hubungan Principal dan Agent. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Volume 07, Nomor 02, 1–22. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/9737>
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No 77 Tahun 2020, 1–445.

- Pujiani, E. S., L, B. A. H., & Astuti, W. (2022). Analisis efektifitas dan efisiensi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) Dalam pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Risma*, 2(3), 598–607. <http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253/180>
- Pujiastuti, Sa'diyah, Lestari, & Mustafa. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 1(09), 09.
- Putra, A. F. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.9.1.1-10>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Saknosiwi, Y. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 37–45.
- Sembiring, H. A. Z., & Prana, R. R. (2023). The Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Guna Menilai Kinerja Keuangan Sekolah Dasar. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 233–241. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3673>
- Suprayoga, M. I., Saladin, H., & Jusmani, J. (2020). Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(2), 186–197. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.5041>
- Syahputra, A. A., & Rahmat, M. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Ekonomi dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. *JAJA: Journal of Accounting, Finance and and Auditing*, 3(1), 46–58.
- Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 250–257. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>
- Widianto, K. P., Trisnantoro, L., & Padmawati, R. S. (2015). Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Pada Program Kesehatan Jiwa Masyarakat Puskesmas di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 4(2), 44–49. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36093>